



RABU, 31 OKTOBER 2018

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Blacklist Rekanan Tidak Tuntas Kerjakan Proyek

PELABAI - Pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik tahun 2019 diharapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong benar-benar selektif dalam memilih rekanan pelaksana. Jangan sampai menyerahkan pekerjaan fisik kepada perusahaan yang tidak dapat menuntaskan pekerjaan pembangunan tepat waktu.

Bahkan untuk kontraktor yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tahun ini, diminta di-blacklist saja. "Jangan hanya perusahaannya. Kontraktor pelaksana juga harus di-blacklist. Soalnya banyak pekerjaan fisik di Lebong yang nama perusahaannya saja berbeda, orangnya masih sama," ujar Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lebong, Ahmad Lutfi.

Beberapa pekerjaan fisik tahun 2016 dan 2017 yang tidak selesai tepat waktu bisa dijadikan sebagai contoh. Bahkan beberapa diantaranya terseret kasus hukum. Seperti pembangunan irigasi senilai Rp 2,3 miliar di Desa Mangkurajo, Kecamatan Lebong Selatan. "Termasuk tahun ini, ada beberapa pekerjaan fisik yang tampaknya tidak akan terkejar hingga akhir Desember, itu harus disikapi serius oleh Pemkab," tegas Lutfi.

Pekerjaan yang tidak optimal dari perusahaan atau kontraktor, jelas akan merugikan Pemkab. Khususnya bagi masyarakat yang menjadi sasaran penikmat pembangunan. Justru itu,

Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan (PUPRP) Lebong diharap profesional.

"Harus benar-benar dicek identitas

orang yang ada di balik perusahaan pendaftar lelang pekerjaan fisik. Jangan sampai perusahaan atau kontraktor tak profesional dikasih pekerjaan lagi," tutup Lutfi. (sca)